

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_la_mpiran.pdf
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku-Buku

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT. Yarsif Watampone.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Eddy, O. S. Hiariej. (2017). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Koeswadi, H. H. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, M., & Nawawi, B. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:

Alumni.

- Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). *Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*. JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, 4(1), 590–602. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. hlm 13.
- Puti Priyana, S. H., & Yuliyardi, A. D. (2023). *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya*.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.

Karya Ilmiah

- Abdul Wahid. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?”
Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 307–321.
- Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., ... & Putrazta, S. A. (2025). *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru*. AMU Press, 1–213.
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247–155.
- Batu, M. (2023). Konsep Pidana Mati dan Pandangan Subjektif Hukum Terhadap Rentang Waktu Eksekusi Mati di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 1(2), 111–118. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i2.129>
- Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional. *Yustisi*, 3(1), 37–37. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i1.1120>
- Debora, A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45–63.

<https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>

- Deni, A., & Rahim, A. (2022). Analisis Putusan Hukuman Mati Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007 dan Fiqih Siyasah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 397–414. <https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.171>
- Dewanto, D. R., & Susanti, R. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 64–70.
- Dewanti, Y., Harun, R. R., & Jiwantara, F. A. (2025). Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram. *Commerce Law*, 5(1), 115–125. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7328>
- Dika, R. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82–103. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775>
- Dika, R. A. (2020). Penegakan hukum pelaku perbuatan cabul dalam putusan bebas terhadap perempuan. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 27–46. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>
- Herman, Hendrawan, Sabrina, O. K., Siti A., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 516–530. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.798>
- Kristanto, K., Noerdajasakti, S., Nugraha, S., Fransisco, F., & Mugopal, U. (2024). Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 129–141.
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan hukuman mati di Indonesia dan implikasi pedagogisnya. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.47-55>
- Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 12(1).
- Mardayanti, I. (2024). Implementasi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi dan Bahasa Harapan*, 2(2).

- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>
- Putri, D. M. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>
- Ramadhani, A. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2023/PN Pre). *Doctoral dissertation, IAIN Parepare*.
- Rasad, F. (2021). Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif. *Jurnal HAM*, 12(1).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 373–385. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>
- Yulia, R. (2024). Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru: Analisis Keseimbangan Hak Pelaku dan Korban pada Pasal 100. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 5(1).

Sumber Lain

- Advokat Konstitusi. *Menilik pidana mati dalam KUHP lama dan terbaru*. Advokat Konstitusi, 19 Oktober 2025.
- Amnesty International Indonesia. *Eksekusi mati global cetak rekor, vonis hukuman mati di Indonesia terus bertambah*. Amnesty International Indonesia, 10 November 2025.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pentingnya asesmen risiko dan kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 20 November 2025.

Dandapala. *Hukuman mati perspektif perbandingan UUD 1945 dan UU HAM*. Dandapala, 24 Oktober 2025.

Human Rights Watch. *Malaysia repeals mandatory death penalty*. Human Rights Watch, 20 April 2023.

ICJR. *Hukuman mati membunuh orang, bukan kejahatan*. ICJR, 1 November 2025.

Imparsial. *Mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin hak hidup setiap warganya*. Imparsial, 17 Mei 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Deret tunggu hukuman mati tinggi, Komnas HAM kaji rancangan peraturan pemerintah*. Komnas HAM, 19 Oktober 2025.

Marineews Mahkamah Agung. *Sejarah, perkembangan, dan masa depan KUHP di Indonesia*. Marineews Mahkamah Agung, 24 Mei 2025.

Metrotvnews. *Indonesia masih jatuhkan vonis mati di tengah penurunan tren global*. Metrotvnews, 11 November 2025.

Tempo.co. *Hukuman mati ada karena pengaruh pemerintahan kolonial Daendels*. Tempo.co, 23 Oktober 2025.

Internet

<https://www.ditjenpas.go.id/pentingnya-asesmen-risiko-dan-kebutuhan-dalam-upaya-peningkatan-kualitas-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 20 November 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati-lt53df2c50e4980/>, diakses pada tanggal 3 November 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

<https://icjr.or.id/hukuman-mati-membunuh-orang-bukan-kejahatan/>, diakses pada tanggal 1 November 2025.

<https://imparsial.org/mempertanyakan-komitmen-pemerintah-indonesia-dalam-menjamin-hak-hidup-setiap-warganya/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

<https://www.komnasham.go.id/deret-tunggu-hukuman-mati-tinggi-komnas-ham-kaji-rancangan-peraturan-pemerintah>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

<https://marineews.mahkamahagung.go.id/hukum/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025.

<https://www.metrotvnews.com/read/K5nC70D7-indonesia-masih-jatuhkan-vonis-mati-di-tengah-penurunan-tren-global>, diakses pada tanggal 11 November 2025.

<https://www.tempo.co/sains/hukuman-mati-ada-karena-pengaruh-pemerintahan-kolonial-daendels-219012>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

<https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

<https://dandapala.com/article/detail/hukuman-mati-perspektif-perbandingan-uud-1945-dan-uu-ham>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>, diakses pada tanggal 10 November 2025.

<https://www.hrw.org/id/news/2023/04/20/malaysia-repeals-mandatory-death-penalty>, diakses pada tanggal 20 April 2023.